

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/PMK.03/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU

A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI
PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK
PENGHASILAN

Nomor :⁽¹⁾
Hal : Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1)
huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E
Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽³⁾
NPWP :⁽⁴⁾
Nomor telepon :⁽⁵⁾
Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak

Nama :⁽⁶⁾
NPWP :⁽⁷⁾
Alamat :⁽⁸⁾
Nomor telepon :⁽⁹⁾

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-
Undang Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan.

.....,20.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada ☐ Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada ☐ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
2. *) coret salah satu

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak .
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor telepon penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak /wakil/kuasa.

B. CONTOH PERMOHONAN SURAT KETERANGAN

Nomor :(1)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Memenuhi
Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
NPWP :(4)
Alamat :(5)
Nomor telepon :(6)

Bertindak selaku ☐ Wajib Pajak
☐ wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat :(9)
Nomor telepon :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20.....(11)

..... (12)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada ☐ Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada ☐ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
2. *) coret salah satu

21

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Alamat penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor telepon penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak/wakil/kuasa.

C. CONTOH SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(7)

kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



.....,20....(8)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(9)
NIP

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Tanggal akhir Tahun Pajak sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 atau tanggal akhir Tahun Pajak 2018 untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 23/2018.
- Nomor (8) : Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

D. CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾
KANTOR PELAYANAN PAJAK⁽²⁾

Nomor : S-...../WPJ.... /KP...../20.....⁽³⁾
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018.

Yth.....⁽⁴⁾

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ yang
diterima pada tanggal20...⁽⁷⁾ atas nama Wajib Pajak:

Nama :⁽⁸⁾
NPWP :⁽⁹⁾
Alamat :⁽¹⁰⁾

ditolak, dengan alasan:

- ☐ Bukan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- ☐ Telah memilih dikenai Pajak Penghasilan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- ☐ Peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya telah melebihi Rp4.800.000.000,00; atau
- ☐ Belum menyampaikan SPT Tahunan PPh. *)

Demikian untuk dimaklumi.



.....,20....⁽¹¹⁾
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....⁽¹²⁾
NIP

*) bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keterangan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan diterima KPP.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya penolakan permohonan Surat Keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001

